

## Daftar Pustaka

### **Buku :**

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Depok.
- Angkasa. 2020. *Viktimologi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Fardiansyah., Hardi. 2022. *Penegakan Hukum Dalam Pandangan Sosiologi Hukum*. Dalam L. M. Ricard Zeldi Putra (Ed), *Sosiologi Hukum*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*, Wal Ashri Publishing, Medan.
- Herimulyanto, Agustinus, 2019. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Iswara, I Made Agus Mahendra. 2017. *Nilai-nilai Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*. Ruas Media, Yogyakarta.
- Kristiana, Yudi. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, Mataram.
- Mulyadi, Lilik. 2020. *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Oktaviandi, Wahyu. 2022. *Keadilan Restoratif, Tak Selamanya Tindak Pidana Harus Berakhir di Pengadilan*. Rumah Pustaka, Indramayu.
- Pardede, Rudi. 2017. *Proses Pengembalian Kerugian Negara akibat Korupsi*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Salim dan Erlis Septiana Nurbani. 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.

- \_\_\_\_\_. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia, Jakarta.
- Sukardi. 2020. *Restorative justice Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia*. Rajawali Pers, Depok.
- Syafrinaldi. 2016. *Proses Pengembalian Kerugian Negara akibat Korupsi*. Genta Publising, Yogyakarta.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Waluyo, Bambang. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative justice*. Rajawali Pers, Depok.

### **Jurnal :**

- Abdul Jalil. 2021. Penegakkan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan). *Administrative Law & Governance Journal, Volume 4 Issue 2, June 2021*.
- Adam Prima Mahendra. 2020. Mediasi Penal Dalam Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurnal Jurist Diction Volume 3 No. 4, Juli 2020*.
- Ade Paul Lukas. 2010. Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010*.
- Agnes Grace Aritonang. 2021. Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Crepido, Volume 03, Nomor 01, Juli 2021*.
- Andri Wijaya Laksana. 2017. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1 Januari - April 2017*.
- Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda. 2021. Efektivitas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021*.

- Appludnopsanji dan Pujiyono. 2020. Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal SASI, Volume 26 Nomor 4, Oktober - Desember 2020*.
- Bambang Waluyo. 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember 2014*.
- Basir Rohrohmana. 2017, Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1 Tahun 2017*.
- Beja Suryo Hadi Purnomo. 2018. Kedudukan Media Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indoneisa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 2, Desember 2018*.
- Budi Pramono. 2017. Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Perspektif Hukum Vol. 17 Issue 1 Mei 2017*.
- Budi Suhariyanto. 2016. *Restorative justice* Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal RechtsVinding, Vol. 5 No. 3, Desember 2016*.
- CSA. Teddy Lesmana. 2019. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No. 1 2019*.
- Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi, 2022. Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakkan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Januari-April 2022*.
- Dian Herdiana. 2019. Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa, (*on line*), *Matra Pembaruan (Jurnal Inovasi Kebijakan)*, [jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp](http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp), DOI : 10.21787/mp.3.1.2019.1-11, [https://www.researchgate.net/publication/332967503\\_Kecenderungan\\_Perilaku\\_Koruptif\\_Kepala\\_Desa\\_dalam\\_Pembangunan\\_Desa](https://www.researchgate.net/publication/332967503_Kecenderungan_Perilaku_Koruptif_Kepala_Desa_dalam_Pembangunan_Desa), diakses pada 12 Agustus 2022.
- Donald Black. 1972. *The Boundaries of Legal Sociology. The Yale Law Journal*, Vol. 81 No. 6, Mei 1972.
- Eddy O.S. Hiariej.2013. Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Masalah-masalah Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jilid 42 No. 1 Januari 2013*.

- Farida Sekti Pahlevi. 2022. Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022.
- Febrina Hertika Rani dan Luil Maknun. 2020. Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia Dan Negara Lain. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, Juni 2020.
- Fuzi Narindrani. 2020. Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan *Restorative justice*, (on line), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 4, Desember 2020, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1425/pdf>, diakses 12 Agustus 2022.
- Guntur Rambey. 2016, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016.
- Hariman Satria. 2018. *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, (on line), *Jurnal Media Hukum* Vo. 25 No. 1 / Juni 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/267453-none-97a73a66.pdf>, diakses 27 Agustus 2022.
- Herman Katimin. 2020. Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal SASI* Vol. 26 No. 1, Januari-Maret 2020.
- I Made Agus Mahendra Iswara, I Ketut Kartika Widnyana, Made Gede Arthadana. 2021. Kebijakan Pidana Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil (*Patty Corruption*) Dengan Pendekatan Kemanfaatan, *Jurnal Hukum Saraswati* Vol 3 No 2 Tahun 2021 : 41-55.
- I Wayan Didik Prayoga dan I Ketut Rai Setiabudi. 2021. Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10 No. 4 Desember 2021.
- Ika Dewi Sartika Saimima, dkk. 2021. Mediasi Penal Dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Simbur Raya Universitas Sriwijaya*, Hal. 122-123. <http://repository.ubharajaya.ac.id/9937/1/Mediasi%20Penal.pdf#> diakses pada tanggal 18 Januari 2023.
- Indah Sari. 2019. Unsur-unsur Delik Materiil Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 10 No. 1, September 2019.

- Izzy Al Kautsar dan D.W. Muhammad. 2022. Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 7 Nomor 2, 2022.*
- Kristwan Genova Damanik. 2016. Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Masalah-masalah Hukum Jilid 45 No. 1, Januari 2016.*
- Kuat Puji Prayitno. 2012. *Restorative justice* Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakkan Hukum *in Concreto*). *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012.*
- Lilik Mulyadi. 2013. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktek, *Jurnal Yustisia Vol. 2 No. 1 Januari – April 2013.*
- Lutfil Ansori. 2017. Reformasi Penegakkan Hukum Perspektif Hukum Progresif, (*on line*), *Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017*, <https://www.neliti.com/id/publications/282166/reformasi-penegakan-hukum-perspektif-hukum-progresif>, diakses 10 Agustus 2022.
- M. Muslih, 2013. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Jurnal Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV.*
- Mita Rosaliza. 2015. Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No. 2 Februari Tahun 2015*, hal. 71.
- Moch. Abd. Wachid. 2019. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK. *Maksigama Jurnal Hukum Tahun 18 Nomor 1 periode November 2015.*
- Moch. Choirul Rizal. 2017. Pitutur Luhur Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Oktober 2017.*
- Muhammad Fatahillah Akbar. 2022. Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No. 2, April 2022.*
- Mukhlis R, 2012. Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 1.*
- Putri Hikmawati. 2019. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?, (*on line*), *Jurnal Negara Hukum Vol. 10, No. 1, Juni 2019*.<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1217/pdf>, diakses 28 Agustus 2022.



- Putu Eka Pitriyantini. 2019. Peraturan Kebijakan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.*
- Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi. 2019. Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 2019.*
- Sergio M.A. Lasut, Fonnyke Pongkorung, Coby E.M. Mamahit, 2017. Pemberlakuan Sanksi Administratif Terhadap Korporasi Apabila Melakukan Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017.*
- Sri Nur Hari Susanto, 2019. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019.*
- Trifena Julia Kambey, Tanny Rompis, dan Altje A. Musa, 2020. Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020.*
- Yusriando. 2015. Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1 Januari - April 2015.*

#### **Disertasi:**

- Rohcahyanto, Fitroh. 2018. Memperdagangkan Pengaruh (*trading in influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya (Tidak dipublikasikan).

#### **Tesis:**

- Yul Khaidir F. 2020. Penetapan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Alasan Tersangka Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. *Tesis*, Progran Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang (Tidak dipublikasikan).

#### **Internet:**

- Admin. 2022. *Pengertian Metode Pengumpulan Data, Jenis, Cara Menulis, dan Contohnya.* PenelitianIlmiah.com, 10 desember 2022,

<https://penelitianilmiah.com/metode-pengumpulan-data/>, diakses 04 Februari 2023.

Anwar Anas. 2020. *Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, (on line)*, Owntalk.co.id, Jakarta. <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>, diakses 25 Agustus 2022.

Ayu Rifka Sitoresmi. 2021. *Pengertian Hukum Beserta Tujuan, Fungsi, dan Jenis-jenisnya yang Perlu Dipelajari, (on line)*, Liputan6 16 Mei 2021. <https://hot.liputan6.com/read/4560362/pengertian-hukum-beserta-tujuan-fungsi-dan-jenis-jenisnya-yang-perlu-dipelajari>, diakses 27 Agustus 2022.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Fersi On line*, <https://kbbi.web.id/pulih>, diakses pada tanggal 29 April 2023.

BPHN. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-anak, (on line)*, BPHN, Jakarta. [https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf), diakses 26 Agustus 2022.

Dita Kurniasari. 2021. *Analisis Data Adalah: Mengenal Pengertian, Jenis, Dan Prosedur Analisis Data*, Artikel. dqlab, 21 April 2021, <https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>, diakses tanggal 04 Februari 2023.

Ika Ningtyas. 2019. *Benarkah 900 Kades Terjerat Korupsi Dana Desa?. (on line)*, Tempo.com. 29 januari 2019. <https://cekfakta.tempo.co/fakta/115/fakta-atau-hoax-benarkah-900-kades-terjerat-korupsi-dana-desa>, diakses 13 Agustus 2022.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 2022. *Jam Pidsus Kejagung: Perkara Tipikor Guna Optimalisasi Penyelamatan Keuangan Negara*. Beranda > Berita, 23-03-2022, <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=25&id=18910>, diakses 26 Agustus 2022.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, tersedia di website <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses 26 Agustus 2022.

Ma'mun Zahrudin. 2015. *Metodologi Penelitian*. Artikel, 11 September 2015, <https://metodologinurelghazy.blogspot.com/2015/09/penyajian-data.html>, diakses tanggal 04 Februari 2023.

- Populix. 2021. *Pengertian Data Primer dan Perbedaannya Dengan Data Sekunder*, (on line), info.populix.co. <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/>, diakses 10 Agustus 2022.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. 2022. *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini*, Pusat Edukasi Antikorupsi. 24 Mei 2022. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, diakses 13 Januari 2023.
- Rina Hayati. 2020. *Pengertian Data Sekunder, Kelebihan, Kekurangan, dan contohnya*. PenelitianIlmiah.com. <https://penelitianilmiah.com/data-sekunder/>, diakses 21 Agustus 2022.
- Salsabila Miftah Rezkia. 2020. *Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*. Artikel, dqlab, 11 September 2020, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data#:~:text=Bentuk%20penyajian%20data%20kualitatif%20bisa,sehingga%20akan%20semakin%20mudah%20dipahami.>, diakses tanggal 04 Februari 2023.
- Satuhukum.com. 2020. *Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*. Satuhukum.com, Agustus 2020. <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses 13 Januari 2023.
- Solehuddin, 2022. *Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum Oleh Polisi?*, Hukumonline.com, 1 April 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggar-surat-edaran--bisakah-diproses-hukum-oleh-polisi-lt62146dc9da7c2/>, diakses 13 Mei 2023.
- Tim Hukumonline. 2022. *Fungsi Hukum Menurut Para Ahli*, Hukumonline.com, 26 September 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-hukum-menurut-para-ahli-lt633130942b5b2/>, diakses 16 Januari 2022.
- Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. 2019. *Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum*, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Hal. 7-8. <https://kepri.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/TLHK-1-Keuangan-Negara-dan-Kerugian-Negara-dalam-Perspektif-Hukum.pdf>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023.
- Trisna Wulandari. 2022. *5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Siswa Catat Ya!*. Artikel detikedu, 19 Oktober 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya.>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023.
- Uceo. 2016. *Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian*, Artikel. Program Studi Informatika Universitas Ciputra, 25 Februari 2016,



<https://informatika.uc.ac.id/id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/#:~:text=Metode%20pengumpulan%20data%20adalah%20teknik,yang%20digunakan%20untuk%20mengumpulkan%20data.,> diakses tanggal 04 Februari 2023.

Yoni Ardianto. 2019. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif, (on line)*, Artikel DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia 6 Maret 2019, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, diakses 11 Agustus 2022.

Yul Khaidir F. 2020. *Penetapan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Alasan Tersangka Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara*, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang. [https://repository.unsri.ac.id/44681/9/RAMA\\_74101\\_02012681620042%200018096509\\_0024018303\\_01\\_FRONT\\_REF.pdf](https://repository.unsri.ac.id/44681/9/RAMA_74101_02012681620042%200018096509_0024018303_01_FRONT_REF.pdf), diakses 26 Agustus 2022.

Yusuf Abdhul. 2021. *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Dan Metode*. deepublish store, 25 November 2021, <https://deepublishstore.com/studi-pustaka/>, diakses tanggal 04 Februari 2023.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jakarta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Pemulihan Aset*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jakarta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jakarta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd/04/2018 tanggal 20 April 2018 Perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jakarta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-945/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018 Perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jakarta.